

Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan

Muhammad Surya Bhaskara¹ Panji Suwarno² Agus Adriyanto³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵ Achmed Sukendro⁶

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Pascasarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: m.suryabhaskara.msb@gmail.com¹ panjisuwarno@gmail.com² agus.adriyanto34@gmail.com³ pujiwidodo78@gmail.com⁴ herlinasara897@gmail.com⁵ achmedsukendro@gmail.com⁶

Abstrak

Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi.

Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal

Abstract

The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation.

Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, membuat Indonesia memiliki kondisi maritim yang sangat kompleks dan unik. Kondisi maritim Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis, iklim, dan topografi. Indonesia memiliki wilayah terluas ke-kepulauan di dunia dan posisi geografis yang strategis, membuat negara ini sangat penting bagi aktivitas maritim dunia. Kondisi maritim Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh letak geografis yang berada di garis

khatulistiwa, sehingga mempengaruhi iklim maritim dan membuat wilayah ini memiliki arus laut yang kuat dan beragam. Salah satu wilayah maritim yang strategis ialah laut china selatan atau laut natuna utara.

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah laut paling penting di dunia, dengan rute perdagangan global yang melalui lalu lintas kapal besar yang mengangkut barang-barang dari Asia ke Amerika dan Eropa. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi pulau-pulau kecil dan terumbu karang yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan sumber daya laut lainnya. Oleh karena itu, Laut China Selatan sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan strategis negara-negara di kawasan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau termasuk Kepulauan Natuna yang terletak di utara Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran penting dunia dan kaya akan sumber daya alam, sehingga memiliki nilai aset yang sangat tinggi. Hal ini memicu persaingan dalam kawasan atau regional yang berujung pada ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN selama beberapa dekade terakhir terkait sengketa di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara di kawasan tersebut, juga terdampak konflik tersebut karena wilayah ZEE Indonesia di wilayah Perairan Natuna menjadi klaim sepihak oleh Tiongkok. (Baylon, 2021)

China memiliki tuntutan yang sangat kuat atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk pulau-pulau dan terumbu karang yang juga diklaim oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Tuntutan China didasarkan pada sejarah dan tradisi, serta pada garis dasar yang mereka tetapkan pada tahun 1947, yang menentukan wilayah yang diklaim oleh China di Laut China Selatan. Namun, beberapa negara lain memiliki tuntutan yang berbeda atas wilayah yang sama, dan ini menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Konflik ini juga bersinggungan dengan Indonesia yang mana banyak terjadinya illegal fishing dan konflik territorial di perbatasan khususnya di laut Natuna utara.

Konflik ini membuat masyarakat resah karena aktivitas kapal-kapal China yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan menyatakan klaim kedaulatan yang bertentangan dengan hukum internasional di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut dengan menempatkan kapal perang dan pesawat tempur di Natuna, yang memicu protes dari China.

Namun kenyataannya, sejauh ini yang dilakukan pemerintah ternyata kurang efektif dilihat dari kurangnya sumber daya dan tenaga dari pemerintah, koordinasi yang kurang efektif antar berbagai pemerintah terkait seperti pemerintah nasional dan pemerintah daerah, kurangnya dukungan internasional dari negara lain, faktor politik domestik, seperti isu-isu internal dan pemilihan, mungkin mempengaruhi keefektifan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik Laut China Selatan dan kurangnya strategi serta kebijakan yang jelas dan konsisten dalam mengatasi konflik ini (Aprilla, 2021).

Maka dari itu diperlukan penanganan yang efektif untuk meminimalisir konflik antara Indonesia dan China di laut china selatan dengan sebuah kebijakan bernama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dilihat mampu meningkatkan pengawasan dan keamanan wilayah, memperkuat ekonomi Indonesia, meningkatkan kerja sama regional, dan memberikan akses ke pasar yang lebih besar, sehingga penulis tertarik untuk menulis tentang urgensi penerapan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan.

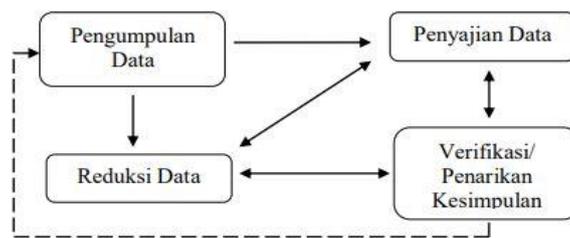
METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meminimalisir Konflik Horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan

ini memusatkan pemahaman terhadap landasan filosofis dan kebermanfaatannya. Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, peneliti berharap dapat menghasilkan sebuah deskripsi yang mendalam dari temuan penelitian dengan bahasa yang lebih dapat dipahami oleh semua pihak, baik dari kalangan pemerhati ilmu sosial sendiri maupun masyarakat awam.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, data primer meliputi hasil yang diperoleh dari wawancara mendalam, pengamatan, dan verifikasi. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan konflik yang terjadi. Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian menetapkan informan yang merupakan Unsur Pemerintah Kabupaten Natuna sekaligus tokoh masyarakat, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah analisis seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Analisa Data Model Interactive
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa: Proses analisis data dilakukan secara bersamaan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinamika Konflik Horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan

Konflik antara Indonesia dan China di Laut China Selatan memburuk pada tahun 2012, ketika China memperkenalkan pasukan militernya ke wilayah tersebut dan mulai membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan fasilitas militer. Ini memicu kekhawatiran bahwa China sedang berusaha untuk mengendalikan Laut China Selatan dan memperkuat posisi mereka di kawasan, dan juga memperburuk konflik dengan negara-negara lain yang memiliki tuntutan atas wilayah tersebut. Pada tahun 2021 china juga mulai mempertegas wilayahnya dengan memberlakukan aturan barunya yaitu Administrasi Keselamatan Maritim yang memiliki kekuatan untuk menghalau atau menolak masuknya kapal ke perairan China jika kapal tersebut ditemukan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional China. Aturan ini dilakukan dengan meminta setiap kapal kapal khususnya melaporkan setiap posisinya ke Beijing saat memasuki daerah claim teritorinya serta tidak segan-segan mengusir siapa saja yang melanggar aturan tersebut. (Sorongan, 2021).

China mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan secara sepihak berdasarkan kepercayaan pada sistem "Traditional Fishing Ground" zaman dinasti, meskipun sistem ini tidak diakui oleh UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 hanya mengatur dan mengakui "Traditional Fishing Rights" yang tercantum dalam Pasal 2. Menurut UNCLOS 1982, Traditional Fishing Rights dan Traditional Fishing Ground saling terkait. Hanya negara yang berdampingan langsung dengan negara kepulauan di mana perairan kepulauan dulunya menjadi daerah penangkapan ikan oleh nelayan dari negara tetangga yang memiliki Traditional Fishing Rights. Tindakan klaim atas fishing ground oleh China dilakukan dengan memasuki kapal nelayan China ke dalam ZEE Indonesia, khususnya di perairan Natuna, yang diawasi oleh kapal coast guard. China merasa memiliki fishing ground atau kepemilikan dari wilayah ZEE tersebut dan memasuki Laut Natuna Utara tanpa izin karena menganggap Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dan perairannya. (Baylon, 2021)

Selain tuntutan wilayah, konflik Laut Cina Selatan juga dipicu oleh sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah terbanyak sumber daya alam laut, seperti minyak dan gas, yang menarik perhatian banyak negara untuk memanfaatkannya. Negara-negara yang memiliki tuntutan atas wilayah tersebut berlomba untuk mengklaim dan memanfaatkan sumber daya alam ini, yang menimbulkan konflik dan perselisihan. Konflik juga dipicu oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan terumbu karang. Negara-negara yang bersaing untuk memanfaatkan sumber daya alam ini seringkali melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, yang memicu kekhawatiran tentang keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam di kawasan. Seperti yang dilakukan oleh Negara China, dilaporkan bahwa China telah membangun 3.200 hektar pulau buatan dilaut china selatan, termasuk membuat landasan militer, hingga 72 hanggar jet tempur. Hal ini tentu saja melanggar konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 1982 yang juga di tanda tangani oleh china. Pembuatan pulau buatan ini telah merusak ekosistem di laut china selatan dibuktikan dengan penurunan jumlah persediaan ikan hamper sepertiga sejak tahun 2015 (Gunawan, 2022).

Selain itu Konflik juga dipicu oleh kepentingan strategis dan militer negara-negara di kawasan. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dengan Amerika dan Eropa, dan juga merupakan rumah bagi jalur komunikasi penting yang menghubungkan Asia dengan dunia. Oleh karena itu, banyak negara berusaha untuk memperkuat posisi mereka di wilayah ini, baik melalui aktivitas militer maupun ekonomi. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara-negara di kawasan mungkin terlibat dalam konflik bersenjata, yang akan membahayakan stabilitas dan keamanan regional.

Pengaruh politik dan ekonomi global juga memainkan peran dalam memperburuk konflik. Beberapa negara memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat dengan negara-negara tertentu di kawasan, dan hal ini mempengaruhi pandangan mereka terkait dengan konflik. Beberapa negara juga berusaha memanfaatkan konflik untuk meningkatkan pengaruh dan kekuasaan mereka di kawasan, menambah kekhawatiran tentang eskalasi konflik. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi konflik tersebut namun sejauh ini ternyata kurang efektif dilihat dari:

1. Kekurangan sumber daya: Pemerintah Indonesia mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan tenaga untuk memfokuskan pada mengatasi konflik Laut Cina Selatan.
2. Kekurangan koordinasi antar pemerintah: Pemerintah Indonesia mungkin kurang efektif dalam mengatasi konflik Laut Cina Selatan karena kurangnya koordinasi antar berbagai pemerintah terkait, seperti pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

3. Kekurangan dukungan internasional: Pemerintah Indonesia mungkin kurang efektif dalam mengatasi konflik Laut China Selatan karena kurangnya dukungan internasional dari negara lain.
4. Faktor politik domestik: Faktor politik domestik, seperti isu-isu internal dan pemilihan, mungkin mempengaruhi keefektifan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik Laut China Selatan.
5. Kekurangan strategi dan kebijakan: Pemerintah Indonesia mungkin kurang efektif dalam mengatasi konflik Laut China Selatan karena kekurangan strategi dan kebijakan yang jelas dan konsisten dalam mengatasi konflik ini (Aprilla, 2021).

Berdasarkan berbagai gambaran dan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk melihat salah satu penyebab ketidak efektifan peran pemerintah dalam penanganan konflik horizontal di Laut China Selatan dengan mengkaji kebijakan yang sesuai berupa kebijakan Kawasan Ekonomi (KEK), sehingga penulis tertarik menulis tentang urgensi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meminimalisir Konflik Horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meminimalisir Konflik Horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan, serta bagaimana Konflik di Kawasan Laut China Selatan.

Konsep Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritime, dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang – bidang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu: zona pengolahan ekspor, logistic, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan dalam negeri. Pada pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui geoekonomi dan geostrategic yang berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki daya saing internasional.

Pembentukan KEK ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Dalam presentasinya tentang pengembangan KEKI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pembentukan KEKI dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

1. memfasilitasi pertumbuhan dan keragaman ekspor,meningkatkan ekspor yang berorientasi PMA;
2. menciptakan industri global yang akan dikembangkan di seluruh lokasi KEKI;
3. menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan kewirausahaan, transfer teknologi, mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi;
4. menciptakan infrastruktur yang lebih baik, lebih kompetitif dalam hal perdagangan dan penanaman modal, dan
5. menjadikan pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengontrol iklim usaha serta mengembangkan kebijakan baru.

Hal yang sama juga diamini oleh Suyono Dikun bahwa pembentukan KEKI memiliki nilai yang positif yakni:

1. peningkatan penanaman modal;
2. memaksimalkan penyerapan tenaga kerja;
3. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
4. mempercepat pembangunan wilayah;
5. mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui alih teknologi.

Kualifikasi KEK

KEK memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan integrated, large scale, mega zones yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, new town, industri, pariwisata, komersial dan utilitas. Di dalam kawasan ini dapat pula dibentuk FTZ, EPZ, dan sebagainya. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersil umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya harus dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang turut bermukim di dalam kawasan.
2. Tersedianya basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai.
3. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor.
4. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
5. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.

KEK merupakan bentuk kawasan ekonomi yang terluas dibandingkan dengan beberapa konsep kawasan ekonomi lainnya sehingga dapat mengakumulasi banyak sector.

Potensi Ekonomi di Natuna

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2017 potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Nomor 711 (WPP-RI 711) di sekitar Laut Natuna dan Laut Natuna Utara sebesar 767.126 ton. Potensi tersebut terdiri dari ikan pelagis besar sebanyak 185.855 ton, ikan pelagis kecil 330.284 ton, ikan demersal 131.070 ton, ikan karang konsumsi 20.625 ton, udang penaeid 62.342 ton, dan lobster 1.421 ton. Potensi kelautan yang begitu kaya ini menjadikan natuna sebagai target tangkap besar bagi nelayan asing. Potensi lainnya yang membuat Natuna menjadi daerah yang sangat kaya adalah cadangan minyak dan gasnya yang menurut data dari laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2021 sebesar 92,63 juta barel standar atau milion stock tank barrel (MMSTB). Sementara itu, cadangan potensial minyak bumi di Laut Natuna Utara adalah 137,13 MMSTB. Cadangan potensial itu terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 MMSTB dan cadangan mungkin 48,23 MMSTB. Di sisi lain, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1.045,62 juta kaki kubik atau billions of standard cubic feet (BSCF). Sedangkan cadangan gas bumi potensial di Laut Natuna Utara sebesar 1.605,24 BSCF yang terdiri dari 1.083,61 BSCF cadangan harapan dan 521,63 BSCF cadangan mungkin. Dengan potensi migas yang sebesar itu bisa banyak menyumbang pendapatan negara dan menjadikan Natuna sumber ekonomi baru bagi Indonesia terkait Minyak dan Gas.

Selain potensi alam, Natuna juga memiliki potensi akan posisinya yang strategis karena berada di laut cina selatan dan merupakan jalur transportasi laut bagi perdagangan internasional. secara geografis, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sisi utara.

Di sisi selatan, Natuna berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian barat, Natuna berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Riau. Di bagian timur, Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Posisi yang strategis ini lah yang menjadikan natuna diinginkan oleh banyak negara.

Masyarakat yang menggunakan kekayaan laut sebagai kekuatan maritim yang berjaya, mandiri, dan berkelanjutan membentuk karakter maritim. Untuk mencapai kejayaan maritim ini, negara harus mampu membentuk masyarakat maritim yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi yang bersumber dari laut. Laut dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia asalkan mereka dapat menghidupkan kembali nilai-nilai dan tujuan bersama untuk meningkatkan penggunaan kekayaan laut. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini, masyarakat dapat bersatu untuk mempertahankan kedaulatan laut dan membagi keuntungan laut secara adil sehingga menciptakan kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ester Nataliana, 2022)

Konflik laut china selatan antara Indonesia dan china membuat potensi tersebut tidak dapat termanfaatkan dengan baik Oleh karena itu, penyelesaian yang damai dan diplomatis terhadap konflik di Laut China Selatan penting untuk memastikan potensi wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik di wilayah tersebut. Penyelesaian yang didasarkan pada hukum internasional, dialog multilateral, dan kerja sama regional dapat membantu mengurangi ketegangan dan memungkinkan potensi Laut China Selatan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia.

Pembahasan

Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus di Natuna

Dalam melihat urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus di Natuna, ditinjau dari segi teori, konflik antara Indonesia dengan China di Laut China Selatan dapat diuraikan menggunakan Teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, pendekatan keamanan, dan pendekatan kompromi.

1. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan kolaboratif adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara bekerja sama untuk mencapai solusi yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam pendekatan ini, kedua belah pihak berusaha untuk memahami pandangan dan kebutuhan satu sama lain, dan kemudian berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima bersama. (Fisher, R., & Ury, W.,1981) Menurut Fisher dan Ury, pendekatan kolaboratif melibatkan empat prinsip yaitu:

- a. Fokus pada kepentingan, bukan posisi: Memperhatikan kepentingan masing-masing pihak dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan tersebut.
- b. Buat opsi-opsi saling menguntungkan: Mengembangkan beberapa opsi yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak.
- c. Gunakan kriteria obyektif: Membahas solusi dengan mempertimbangkan kriteria yang obyektif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- d. Pertimbangkan alternatif terbaik: Menyelidiki alternatif terbaik untuk mencapai solusi yang paling memuaskan untuk kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, jika laut china selatan dapat di maksimalkan potensinya dengan kebijakan KEK maka dapat mengakomodir kerjasama banyak negara terutama china dalam

bidang investasi dan perekonomian maritim. Pendekatan kolaboratif ini dapat meminimalisir ketegangan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antar negara khususnya antara Indonesia dan china seperti adanya investasi perusahaan ekspor atau pengolahan ikan di pelabuhan Natuna. Hal ini dapat menjadi opsi yang saling menguntungkan sehingga dapat menjadi alternatif terbaik yang dapat memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah dapat meningkatkan cadangan devisa dengan terbukanya peluang penanaman modal asing dari negara-negara lain termasuk China. Sehingga bagi masyarakat sendiri hal ini juga dapat meminimalisir dampak konflik dengan terciptanya lapangan kerja baru dan kesempatan untuk meningkatkan keahlian melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari hasil pendekatan kolaboratif tersebut.

2. Pendekatan Keamanan

Pendekatan keamanan adalah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian konflik dengan mengutamakan keamanan nasional dan keamanan internasional. Pendekatan ini sering digunakan dalam situasi konflik antar negara atau konflik bersenjata yang melibatkan kekerasan.

Menurut Kenneth Waltz, ahli teori hubungan internasional, pendekatan keamanan memfokuskan pada kekuasaan dan keseimbangan kekuatan antara negara-negara. Pendekatan ini menganggap bahwa negara-negara akan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan keamanan nasional dan memproyeksikan kekuatan ke luar negeri untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara negara-negara. (Waltz, K. N.,1979).

Dalam hal ini, penerapan KEK memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan keamanan wilayahnya dengan meningkatkan keamanan maritim dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat mengakomodir kepentingan sehingga tidak hanya Indonesia yang menjaga potensi dan teritori laut china selatan, namun pihak lain yang juga berinvestasi di kawasan KEK.

3. Pendekatan Kompromi

Pendekatan kompromi adalah pendekatan yang mencoba menyelesaikan konflik dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan cara saling mengalah. Dalam pendekatan ini, kedua belah pihak harus siap untuk berkomunikasi dan menemukan titik tengah di mana mereka dapat menyetujui suatu kesepakatan. (Thomas, K. W.,1976). Menurut Kenneth Thomas (1976), ahli psikologi sosial, pendekatan kompromi memperkenalkan tiga strategi yaitu:

- a. Kompromi distributif: Kedua belah pihak harus menemukan titik tengah dalam suatu konflik yang berdasarkan pada jumlah tertentu atau pembagian yang adil dari sumber daya atau hasil yang dicapai.
- b. Kompromi integratif: Kedua belah pihak harus menemukan titik tengah yang lebih kompleks dan kreatif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan yang berbeda serta mencari cara untuk memenuhi kepentingan tersebut.
- c. Kompromi interaksi: Kedua belah pihak harus mengembangkan hubungan yang positif, saling memahami, dan bersedia untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, Indonesia dan China dapat menekankan pendekatan kompromi yang dapat memepertemukan kepentingan kedua belah pihak melalui interaksi yang saling menguntungkan, dapat dilihat pada undang-undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa "KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeкономи dan geostrategi dan berfungsi untuk

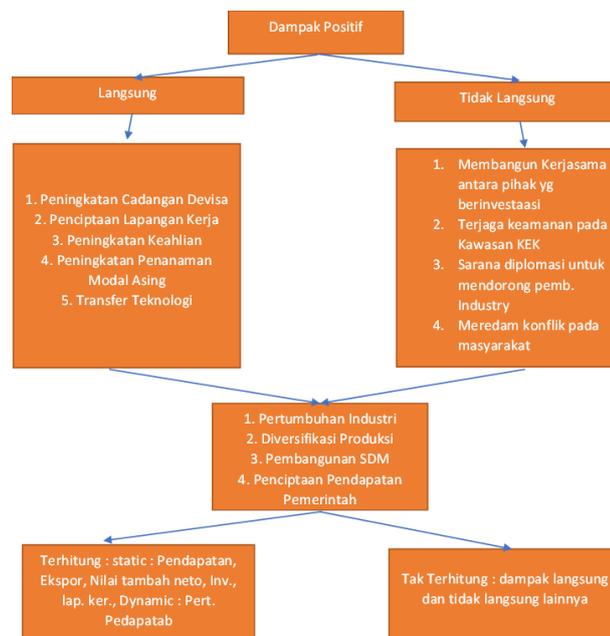
menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional”. Potensi yang ada di laut China Selatan dapat membuka peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan china sehingga dapat tercapainya titik tengah dan kesepakatan mengenai penerapan KEK yang dapat meminimalisir ketegangan antara kedua belah pihak.

Secara umum ditinjau dari teori dan pendekatan diatas, penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat meminimalisir konflik horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan melalui kerjasama antara negara-negara dalam bentuk ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, KEK dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China untuk mengurangi konflik horizontal di Laut China Selatan, karena dapat memfasilitasi dan mendorong investasi, perdagangan, dan industrialisasi di kawasan tersebut. KEK memiliki aturan dan regulasi yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia, seperti insentif pajak, pembebasan pajak impor, dan kemudahan perizinan, sehingga dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Dengan penerapan KEK, Indonesia dapat menawarkan potensi bisnis yang menarik bagi perusahaan asing, termasuk perusahaan asal China. Dalam hal ini, KEK dapat menjadi platform bagi kedua negara untuk bekerja sama dan saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, tanpa menimbulkan konflik horizontal di Laut China Selatan.

Hal ini, didukung oleh Susi Susantijo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa penerapan KEK di Laut China Selatan dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir konflik horizontal antara Indonesia dan China. Dalam pandangan Susi, KEK dapat menjadi alat untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia, termasuk investasi asal China, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Berikut, gambaran dampak positif dari penerapan KEK secara umum di Natuna :



Gambar 2 Gambaran KEK secara umum di Natuna

Tinjauan Terhadap Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah Lain

Salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus adalah Batam. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam diimplementasikan sejak tahun

2021 pada daerah Batam Aero Technic dan Nongsa. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEK Batam Aero Technic dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa pada tanggal 12 Juni 2021. Menko Airlangga menyatakan bahwa kedua KEK ini adalah yang pertama di Batam, sehingga diharapkan dapat menjadi pilot plan, sebagai mercusuar kawasan ekonomi berbasis service dan digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, sebelumnya Batam juga telah menerapkan KEK Galang Batang di Bintan. Untuk KEK yang baru ditetapkan di Nongsa diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2024. Dewan Nasional KEK menunjuk salah satu pejabat BP Batam sebagai Plt. Administrator KEK Kota Batam untuk mendukung kesiapan operasi KEK Nongsa. (BATAM, 2022)

Terkait implementasinya, penerapan KEK dinilai memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto ketika melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam untuk menyerahkan PP KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital menyatakan bahwa penetapan KEK ini sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan berhasil menarik investor baik di dalam maupun di luar negeri. Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa KEK Batam Aero Technic (BAT) yang memiliki luas sebesar 30 ha memiliki target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. Sesuai penetapannya, KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) pesawat penumpang.

Lebih lanjut, pengembangan KEK BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri dan menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dengan nilai bisnis sebesar 100 Milyar USD di tahun 2025. Sementara itu, KEK Nongsa Digital Park seluas 166.45 ha memiliki target investasi sebesar 16 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 16.500 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan berbasis IT-digital dan pariwisata. (Limanseto, 2021) Secara umum, Implementasi KEK di Batam telah memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), KEK Batam telah menciptakan lebih dari 300 ribu lapangan kerja pada tahun 2021. Selain itu, penerapan KEK di Batam juga berhasil mendorong pengembangan infrastruktur yang signifikan, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya.

Di bidang industri dan perdagangan, KEK juga berhasil mendorong hasil produksi pertanian, perkebunan, kerajinan, perikanan yang diolah sebagai bahan mentah industri. Dengan berkembangnya kegiatan KEK, diharapkan akan mendorong perkembangan industri jasa pendukung lainnya yang menjadi usaha masyarakat sekitar, misalnya jasa angkutan, jasa pelayanan penginapan, jasa hiburan, perhotelan dan lain-lain. Meningkatnya perkembangan di sektor perekonomian berkat penerapan KEK berdampak lurus pada daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja sehingga dapat menunjang income perkapita daerah. Secara keseluruhan, implementasi KEK di Batam telah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa keuntungan dari KEK Batam dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi, serta mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan industri di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki peran penting dalam mendorong investasi dan perdagangan di wilayah Indonesia. Dalam konteks konflik horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan, penerapan KEK dapat membantu mengurangi ketegangan antara kedua negara dan mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Penerapan KEK dapat membantu memperkuat ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan investasi dan pengembangan industri. Dalam konteks Laut China Selatan, KEK dapat menjadi tempat di mana perusahaan China dapat berinvestasi dan beroperasi dengan lebih mudah, sehingga meminimalisir potensi konflik dengan Indonesia. Selain itu, dengan penerapan KEK, Indonesia dapat mempromosikan kerja sama ekonomi dengan China, yang dapat membantu meningkatkan hubungan antara kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia dan China dapat saling menguntungkan dalam perdagangan, investasi, dan pengembangan infrastruktur, sehingga menciptakan kondisi yang lebih stabil di wilayah tersebut. Dalam melakukan penerapan KEK, Indonesia harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti keamanan wilayah dan lingkungan, serta hak dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar KEK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia dan mengurangi potensi konflik dengan China di Laut China Selatan. Secara keseluruhan, penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal antara Indonesia dan China di Laut China Selatan. Dengan mendorong investasi dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antara kedua negara di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W. (2021). Indonesia's Efforts in Resolving South China Sea Conflict. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 7.
- BATAM, B. (2022, Desember 26). Data Center KEK Nongsa Diperkirakan Mulai Beroperasi Tahun 2024. Retrieved from [perwakilan.bpbataam: https://perwakilan.bpbataam.go.id/en/data-center-kek-nongsa-diperkirakan-mulai-beroperasi-tahun-2024/](https://perwakilan.bpbataam.go.id/en/data-center-kek-nongsa-diperkirakan-mulai-beroperasi-tahun-2024/)
- Baylon, P. A. (2021). Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut China Selatan Indonesia, *jurnal kewanegaraan volume 5 No 2*.
- Ester Nataliana, d. (2022). Filsafat Pancasila sebagai Karakter Bangsa Indonesia dalam Realisasi Poros Maritim Dunia, *urnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4*.
- Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin.
- Gunawan, S. M. (2022, Februari 15). Pulau-pulau Buatan China di Laut China Selatan Merusak Ekosistem. Retrieved from [dunia.rmol: https://dunia.rmol.id/read/2022/02/15/523385/pulau-pulau-buatan-china-di-laut-china-selatan-merusak-ekosistem](https://dunia.rmol.id/read/2022/02/15/523385/pulau-pulau-buatan-china-di-laut-china-selatan-merusak-ekosistem)
- Limanseto, H. (2021, Juni 12). Publikasi. Retrieved from [ekon: https://www.ekon.go.id/](https://www.ekon.go.id/)
- Miller, Christopher E. 2005. *A Glosaary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies* (2nd Edition). Costa Rica: University for Peace.
- Pudjiastuti, Tri Nuke dan Prayoga, Pandu. 2015. *ASEAN dan Isu Laut China Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur*. Jakarta: LIPI
- Sorong, T. P. (2021, 9 1). News. Retrieved from [cnbcindonesia: www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)
- Thomas, K. W. (1976). Conflict and conflict management. In M. Dunnette (Ed.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (pp. 889-935). Rand McNally.

Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill.